

## PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERIKANAN LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KUMA KECAMATAN ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

*Ongki Andika Lala<sup>1</sup>  
Johannis Kaawoan<sup>2</sup>  
Ismail Sumampow<sup>3</sup>*

### Abstrak

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang besar dengan segala kekayaan sumber daya lautnya, Demikian halnya yang terjadi di wilayah pesisir, wilayah pesisir dan lautan. Sumber daya alam yang terkandung didalamnya merupakan tumpuan harapan Negara Indonesia dimasa yang akan datang, Sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah desa dalam hal ini diharapkan mampu berperan aktif menciptakan terobosan program untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam hal ini diharapkan mampu berperan aktif menciptakan terobosan program untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari mata pencaharian sebagai nelayan sangat dipengaruhi oleh iklim sehingga masih penuh dengan ketidak pastian. Dengan didukung oleh kewenangan yang diberikan undang-undang desa serta dukungan pendapatan desa yang cukup memadai maka menarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran pemerintah desa Kuma dalam memanfaatkan sumber daya alam di bidang kelautan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Kuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam menjalankan peran alokasi Pemerintah Desa Kuma dapat dikatakan sudah baik dalam mengalokasikan program dan dana khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kuma melalui pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan laut, sedangkan pelaksanaan peran distribusi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kuma dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa untuk melaksanakan program yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan satu golongan masyarakat saja.

**Kata Kunci:** Masyarakat dan Peranan Pemerintah Desa

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## **Pendahuluan**

Hasil dari mata pencaharian sebagai nelayan sangat dipengaruhi oleh iklim sehingga masih penuh dengan ketidakpastian. Terkadang nelayan harus berhenti melaut ketika pada musim angin barat maupun angin selatan, hal ini menyebabkan nelayan harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mereka tidak melaut. Contoh seperti ini membutuhkan peran serta pemerintah desa dalam menawarkan suatu solusi alternatif bagi masyarakat dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat desa Kuma masih terfokus pada pemanfaatan potensi laut secara tradisional, mereka belum mampu untuk melihat potensi lain yang sebenarnya dapat juga dikembangkan seperti potensi dalam bidang wisata laut, atau bidang perikanan tambak apung (menggunakan jarring) atau bahkan pembuatan cinderamata dari berbagai jenis kerang dan bahkan potensi dalam bidang kuliner seperti rumah makan ikan bakar dan sebagainya.

Dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengelolaan wilayah pesisir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Kuma kecamatan Essang Selatan kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh R.A. Majore pada tahun 2018, dapat ditarik beberapa garis besar diantaranya mengenai tantangan pemanfaatan sumber daya alam dibidang kelautan yang ada di desa Kuma secara berkelanjutan dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Selain itu juga kearifan lokal yang merupakan modal sosial yang ada pada masyarakat desa Kuma yang masih

menjunjung tinggi adat dan norma dalam masyarakat.

Perlu adanya edukasi terhadap masyarakat melalui pendekatan non formal mengenai pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dapat juga dilakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh adat yang ada untuk membantu melakukan edukasi menjaga lingkungan dari kerusakan yang disebabkan ulah manusia. Kemudian hal lain yang perlu menjadi perhatian yaitu mengenai peran pemerintah meningkatkan keterampilan masyarakat desa Kuma dalam memanfaatkan sumber daya dibidang kelautan yang ada. Selain menjadi nelayan diharapkan akan ada inovasi usaha-usaha seperti sentra kerajinan dari kerang, usaha kuliner, perikanan tambak menggunakan jarring dan lain sebagainya. Hal ini tentunya membutuhkan peran serta dari pemerintah khususnya pemerintah desa Kuma, untuk meningkatkan kreativitas masyarakat yang ada melalui sosialisasi dan pelatihan bekerjasama dengan dinas terkait, bahkan bisa juga memberikan dukungan berupa modal usaha yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan di atas maka menarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya laut di desa Kuma. Mengingat potensi kekayaan sumber daya laut yang melimpah serta besarnya kewenangan yang dimiliki oleh desa saat ini untuk mengatur dan mengurus sendiri pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Apalagi tidak hanya diperkuat dalam bidang regulasi, desa juga diberikan sumber pendapatan yang memadai untuk membiayai apa yang menjadi program

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan program tersebut dapat mendorong peningkatan perekonomian di desa.

Dengan didukung oleh kewenangan yang diberikan undang-undang desa serta dukungan pendapatan desa yang cukup memadai maka menarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran pemerintah desa Kuma dalam memanfaatkan sumber daya alam di bidang kelautan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat.

## Tinjauan Pustaka

### Konsep Peran

Smith dalam (Mangkoesebroto, 2013:2) mengemukakan mengenai peran pemerintah dibidang perekonomian masyarakat sebagai berikut:

#### 1. Peran alokasi

Adalah peran pemerintah untuk menghasilkan dan mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal, mengalokasikan program dan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki dalam wilayah tersebut.

#### 2. Peran distribusi

Adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan ditengah masyarakat menjadi merata, guna menciptakan keadilan dan mensejahterakan masyarakat.

#### 3. Peran stabilisasi

Adalah peran pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Menurut Ahmadi (2010:220) peran adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status

dan fungsi sosialnya. Kemudian pengertian peran juga dikemukakan oleh Soekanto (2010:243) yang mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut Soekanto mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu fungsi. Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Hal penting yang harus menjadi tolak ukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo (2012:18) peran pemerintah dapat dilihat dari tiga (3) macam bentuk yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Peran pemerintah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, salah satu factor terpenting adalah masalah keamanan dan ketertiban yang kondusif. Keamanan dan ketertiban yang baik akan memudahkan keberhasilan berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah, karena itu pemerintah memiliki peran sebagai penjaga keamanan dan ketertiban.

## 2. Peran pemerintah sebagai pelayan publik

Pemerintah juga memiliki peran sebagai abdi sosial dari keperluan-keperluan masyarakat, memastikan segala keperluan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik baik yang bersifat administrative maupun bidang pelayanan publik lainnya dapat terlaksana dengan baik.

## 3. Peran pemerintah sebagai pendorong inisiatif masyarakat

Selain memegang peran dalam aspek regulasi, pemerintah juga memiliki peran sebagai barometer penggerak inisiatif dari masyarakat. Supaya mereka bergerak melakukan suatu perubahan untuk memperbaiki kondisi mereka saat ini menjadi lebih baik, tentunya melalui program yang diberikan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat.

Kemudian menurut Gayatri (2010:95) pemerintah memiliki peran untuk mengembangkan potensi daerahnya sebagai:

### 1. Motivator

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah sebagai motivator sangat diperlukan agar geliat usaha terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha dalam berbagai bidang sesuai dengan potensi yang ada merupakan sasaran utama untuk terus diberikan motivasi agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

### 2. Fasilitator

Sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung berbagai program yang telah ditetapkan. Adapun dalam pelaksanaannya pemerintah bisa

mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

### 3. Dinamisator

Dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah desa sebagai salah satu stakeholder peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan ekonomi masyarakat.

Selain membahas mengenai peran, penting juga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan peranan untuk menambah pengetahuan tentang konsep peranan. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan hal ini dikemukakan oleh Soekanto, 2015:234. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang atau kelompok, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat atau yang juga dikenal dengan Social Position merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

## Konsep Pemerintah Desa

Sebelum berbicara mengenai pemerintah Desa, terlebih dahulu kita harus mengenal mengenai konsep pemerintah. Sebab pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah.

Berikut konsep pemerintah menurut para ahli:

Menurut Kusnardi dan Saragih (2009:122) Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Ndraha (2014:70) Pemerintah yaitu organ yang berwenang memberikan perintah, serta berkewajiban memproses pelayanan bagi setiap anggota masyarakat yang bersangkutan saat diperlukan.

Menurut Sayre dalam Inu Kencana Syafii (2011:09) Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Menurut Wilson dalam Inu Kencana Syafii (2011:10) Pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Apter dalam Syafii (2011:10) Pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Rudy dalam (Surasih 2012:23) pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kemudian adapun definisi tentang kepala desa sebagaimana yang dikemukakan oleh Ndraha dalam (Surasih 2012:25) adalah kepala desa merupakan pimpinan di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pimpinan formal yang ada di tingkat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Adapun pengertian lain yang dikemukakan oleh Tahmit dalam (Surasih 2012:26) kepala desa adalah pimpinan dari desa di Indonesia, kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan kearifan lokal yang ada di desa setempat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Sesuai dengan isi dari undang-undang desa bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dengan demikian perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Kemudian pelaksana teknis merupakan

unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan menteri.

Sesuai dengan uraian di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh kepala desa setelah dikoordinasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## **Konsep Sumber Daya Laut**

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu wilayah administrasi yang berada di provinsi Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik sebagai kabupaten kepulauan. Sebagai daerah kepulauan, kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya kurang lebih 37.800 Km<sup>2</sup> (96,79%) dan luas wilayah daratan kurang lebih 1.251 km<sup>2</sup> (3,21%). Sesuai dengan data Puslitbang sumber daya laut dan pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa perairan kabupaten Kepulauan Talaud memiliki batimetri yang relatif dalam, dengan kemiringan yang curam baik ke arah barat maupun ke arah timur.

Perairan kabupaten Kepulauan Talaud berada di atas punggung laut Talaud (Talaud Ridge), posisi tersebut mempengaruhi proses pertukaran masa air antara samudera pasifik bagian utara dan perairan Indonesia terutama di lapisan dalam. Kondisi oseanografi di kabupaten Kepulauan Talaud sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di samudera pasifik bagian barat disisi

utara dan timur, laut Sulawesi disisi barat, dan laut Maluku disisi selatannya. Hampir sepanjang tahun, perairan kabupaten Kepulauan Talaud dipengaruhi oleh arus permukaan yang mengalir dari laut Filipina menuju selatan melewati palung Filipina. Gelombang laut di kabupaten Kepulauan Talaud sangat dipengaruhi oleh dua angin yang dominan berhembus di wilayah tersebut. Yaitu angin dari barat laut-utara-timur laut, yang terjadi pada saat monsoon barat dan angin dari tenggara-selatan-barat daya, yang terjadi pada saat monsoon timur. Nelayan atau penduduk yang ada di desa Kuma biasa menyebut masing-masing kondisi tersebut sebagai musim angin utara dan musim angin selatan. Musim angin utara umumnya terjadi pada bulan desember hingga februari yang bertepatan dengan musim dingin di Bumi Belahan Utara, sementara musim angin selatan terjadi pada bulan juni hingga agustus yang bertepatan dengan musim panas di Bumi Belahan Utara.

## **Konsep Masyarakat**

Menurut Syani (2013:84) masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak. Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut zoon politicon. Kemudian menurut Ahmadi (2010:56) masyarakat adalah sekelompok individu yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu serta dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Masyarakat juga merupakan suatu kelompok orang yang sama identifikasinya, teratur

sedemikian rupa di dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan bersama secara harmonis.

Pengertian lain tentang masyarakat juga dikemukakan oleh Khairuddin (2008:41) bahwa pengertian masyarakat pada awalnya adalah a union of families atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakana berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat.

Lebih lanjut Soetomo (2009:111) menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang berkelanjutan antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat.

Soekanto (2012:27) mendefinisikan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian gesellaachafi atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu. Soekanto juga berpendapat bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan

tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain.

Sesuai dengan pengertian menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah hubungan seorang atau sekelompok orang yang hidup secara berkelompok maupun individu dan berinteraksi satu sama lain, saling mempengaruhi dan menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data penelitian dalam bentuk deskripsi atau uraian kalimat yang telah dianalisa berdasarkan temuan di lapangan. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:8) sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

fokus dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dibidang Kelautan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori dari Smith dalam (Mangkoesebroto, 2013:2), dengan melihat beberapa aspek peran pemerintah desa seperti:

Peran Alokasi (alokasi program & Dana:

- Mendirikan BUMDES untuk menampung dan memasarkan tangkapan nelayan
- Pelatihan budidaya ikan bagi masyarakat

Peran Distribusi :

- Menjamin peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan di desa

Peran Stabilisasi

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari:

No	Informan	Jumlah
1	Masyarakat (Nelayan)	3 Orang
2	Kepala Desa	1 Orang
3	Kaur Kesejahteraan Rakyat	1 Orang
4	Kepala Dusun	1 Orang
5	Akademisi	1 Orang
6	Tokoh Perempuan	1 Orang
7	Badan Permusyawaratan Desa	1 Orang

## Hasil Penelitian

### Peran Alokasi

Sebagai salah satu dari Sembilan desa yang ada di kecamatan Essang Selatan kabupaten Kepulauan Talaud, desa Kuma memiliki salah satu potensi unggulan yaitu dibidang perikanan laut. Sebagian masyarakat memanfaatkan potensi ini dengan menggeluti profesi sebagai nelayan. Sadar akan potensi perikanan yang dimiliki serta pentingnya menjaga lingkungan agar tidak tercemar maka masyarakat desa kuma berperan aktif menjaga lingkungan. Hasil wawancara dengan informan M.L (52) yang merupakan warga dusun I bahwa: "kami saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan khususnya Laut dari pencemaran, dalam interaksi sehari-hari masyarakat saling mengajak untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi membuang di laut"

(sumber: Hasil wawancara dengan informan M.L pada September 2019)

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan peran alokasi dari pihak pemerintah desa Kuma untuk mengalokasikan program dan dana

dalam memanfaatkan sumber daya alam dibidang perikanan laut dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh informan H.L (46) yang merupakan pemerintah desa bahwa:

"sesuai yang tertuang dalam RKP Desa yang mengacu pada RPJM Desa maka pemerintah desa Kuma menyediakan sarana dan prasarana lewat bantuan peralatan dan bahan, serta pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi Nelayan yang ada. Bantuan dimaksud berupa pemberian perahu pampoat dan sarang ikan (rumpon/ponton) bagi nelayan"

(sumber: Hasil wawancara dengan informan H.L pada September 2019)

Hal tersebut diatas juga dibenarkan oleh beberapa nelayan yang ditemui peneliti di beberapa tempat terpisah yang mengatakan terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah desa Kuma berupa pemberian perahu pampoat dan edukasi mengenai cara menangkap ikan yang berwawasan lingkungan serta berorientasi pada keberlanjutan ekosistem laut. Selain itu juga terdapat Badan Usaha Milik Desa yang menyediakan berbagai peralatan khususnya yang dibutuhkan oleh nelayan.

Jika menggunakan tolak ukur yang dikemukakan oleh Gayatri (2010:95) maka dapat juga dikatakan bahwa pemerintah desa Kuma telah berperan sebagai fasilitator yang baik bagi masyarakat yang ada. Dimana Sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung berbagai program yang telah ditetapkan. Adapun dalam pelaksanaannya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Peran alokasi pemerintah desa Kuma ini juga dikatakan baik karena menjawab kebutuhan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh salah satu nelayan yang juga merupakan informan dalam penelitian ini I.R (44) bahwa:

“sebagai nelayan kami mengharap adanya program bantuan berupa alat-alat untuk menangkap ikan dan fasilitas lain yang lebih baik dan lebih muda digunakan agar bisa mendapatkan hasil tangkapan yang banyak”

Dalam pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan laut, nelayan yang ada di desa Kuma juga seringkali terkendala dengan cuaca yang tidak menentu. Sebagaimana keluhan salah satu nelayan yang menjadi informan dalam penelitian ini yang mengatakan faktor cuaca adalah hal yang tidak dapat diprediksi sehingga ketika cuaca sedang tidak bersahabat seperti saat kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang berada di atas 1.5 meter beresiko tinggi bagi nelayan jika melaut. Akibatnya jika nelayan tidak bisa melaut maka mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan harus mencari alternatif lain. Atau jika bisa melaut pun akan berpengaruh pada hasil tangkapan yang diperoleh.

### **Peran Distribusi**

Masyarakat desa kuma terdiri dari berbagai macam jenis pekerjaan dalam menunjang kebutuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu pemerintah desa dalam menjalankan peran distribusi harus mampu menerapkan secara merata agar terjadi pemerataan pendapatan dalam masyarakat dan tercipta keadilan di tengah masyarakat. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa terdapat beberapa program yang dihasilkan selain mengenai bantuan bagi nelayan.

Pembangunan jalan desa merupakan salah satu contoh upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kuma dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran distribusi dan menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah desa Kuma tidak hanya fokus pada rencana peningkatan kesejahteraan nelayan tetapi mereka juga dengan proaktif melihat kebutuhan masyarakat lain yang mengeluhkan tentang rusaknya jalan dan perlu adanya perbaikan dari pemerintah desa.

### **Peran Stabilisasi**

Sesuai dengan namanya bahwa peran pemerintah desa dalam hal stabilisasi atau keseimbangan, dalam hal ini yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pemanfaatan sumber daya alam dibidang kelautan. Untuk menjamin stabilitas pemanfaatan sumber daya alam dibidang kelautan, pemerintah desa Kuma memiliki suatu instrument yang juga diakui dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan yakni keberadaan hukum adat.

Pengelolaan sumber daya alam dibidang kelautan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan lingkungan hidup oleh karena itu maka dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal ini merupakan nilai-nilai luhur yang hidup didalam masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan pada masyarakat, kearifan lokal ini juga seringkali dilindungi dengan hukum adat.

Dalam undang-undang kelautan masyarakat adat perlu untuk berperan

serta dalam pembangunan kelautan baik dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan serta memberikan masukan dalam evaluasi dan pengawasan. Selain itu masyarakat adat berhak untuk berpartisipasi dalam melestarikan nilai budaya dan warisan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan.

Dengan adanya pengakuan terhadap kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumber daya alam dibidang kelautan maka pemerintah desa Kuma memiliki suatu instrument untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat.

Untuk menjalankan peran stabilisasi, pemerintah desa Kuma melakukan melalui pendekatan budaya sebagaimana yang juga diatur dan diakui oleh undang-undang kelautan. Pemerintah desa Kuma mengupayakan stabilisasi dalam berbagai sektor dengan pendekatan kearifan lokal, sebagaimana masyarakat desa Kuma yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan dalam hukum adat yang diyakini turun temurun oleh masyarakat.

## Kesimpulan

1. Dalam proses penyusunan program pembangunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa belum melibatkan masyarakat secara maksimal, atau dengan kata lain musyawarah yang dilakukan masih bersifat formalitas dan seremonial saja
2. Dalam menjalankan Peran Alokasi pemerintah desa Kuma dapat dikatakan sudah baik dalam mengalokasikan program dan dana khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa Kuma melalui pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan laut

3. Pelaksanaan Peran Distribusi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kuma dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa untuk melaksanakan program yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan satu golongan masyarakat saja
4. Dalam menjalankan Peran Stabilisasi atau Keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dibidang kelautan, pemerintah desa Kuma sesuai dengan undang-undang kelautan menjadikan kearifan lokal sebagai sarana untuk menjamin adanya stabilisasi atau keseimbangan. Hal ini untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab.
5. Sumber daya alam dibidang kelautan yang terdapat di desa Kuma sangat melimpah akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal, karena belum didukung oleh teknologi dan fasilitas yang memadai
6. Kesadaran masyarakat desa Kuma untuk menjaga lingkungan yang juga merupakan salah satu sumber kekayaan wilayah desa Kuma khususnya maupun wilayah kepulauan Talaud pada umumnya dapat dikatakan baik, dengan adanya inisiatif dari masyarakat untuk sadar membuang sampah pada tempatnya, kesadaran nelayan untuk tidak menggunakan bom ikan yang dapat merusak ekosistem laut. Hal ini tidak lepas dari peran serta pemerintah desa Kuma
7. Prioritas pemerintah desa Kuma untuk memberikan bantuan kepada

nelayan dalam bentuk perahu pampoat sudah berjalan akan tetapi karena keterbatasan dana yang dimiliki sehingga kuota penerima bantuan juga masih terbatas dan bergantian sesuai dengan skala prioritas yang ada

keberlangsungannya melalui upaya menjaga lingkungan.

7. Masyarakat harus dapat berperan aktif dalam upaya mendukung program pemerintah desa melalui keikutsertaan pada kegiatan swadaya.

## Saran

1. Perlu adanya komitmen bersama dari pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan agar masyarakat dapat mengkreasikan ide dan gagasan mereka dalam program pembangunan sesuai kebutuhan yang mereka rasakan
2. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang dapat menampung dan memasarkan hasil tangkapan nelayan
3. Pemerintah desa hendaknya meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan sehingga mereka dapat menemukan alternatif usaha kreatif lainnya ketika sedang musim gelombang tinggi yang menyebabkan tidak bisa melaut.
4. Keterbatasan dana yang ada hendaknya menjadi suatu perhatian bagi pemerintah desa untuk benar-benar memilih realisasi program sesuai dengan skala prioritas yang urgent dalam masyarakat.
5. Penyediaan fasilitas penangkap ikan yang ramah lingkungan bagi nelayan hendaknya menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah desa Kuma, sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
6. Pemerintah desa Kuma hendaknya terus menghimbau masyarakat dalam menjaga lingkungan, karena kekayaan alam yang melimpah perlu untuk diperhatikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, K. 2012. *Sosiologi Skematik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmadi, A. 2010. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amira, N. 2012. *Peran Pemerintah Daerah di Era Otonomi*. Bandung: Alfabeta
- Barbara, K. 2012. *Peran dan Mobilisasi Kondisi Masyarakat (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gunung Agung
- Berry, L. 2014. *Manajemen Pemasaran Edisi ke Dua*. Jakarta: Mitra Utama
- Gayatri, P. 2010. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Keller, K. 2012. *Manajemen Pemasaran Edisi 12*. Jakarta: Erlangga
- Khairuddin, H. 2013. *Sosiologi Keluarga Cetakan ke 2*. Yogyakarta: Liberty
- Kusnardi, M. dan Saragih, R. 2014. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Mangkoesebroto, G. 2013. *Ekonomi Publik edisi revisi*. Yogyakarta: BPF
- Midgley, J. 2009. *Kesejahteraan Sosial dalam Prespektif Pembangunan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Mosher, A.T. 2009. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasaguna
- Narwoko, J. 2011. *Sosiologi Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ndraha, T. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Rajawali pers

- Poerwadarminta, W. 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Rambe, A. 2015. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Cetakan ke 3. Bandung: Alfabeta
- Rivai, A. 2009. Peran Psikologi Pendidikan. Semarang: Unnes Press
- Sarbin, T. 2011. Narasi Psikologi Cetakan ke Dua. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, P. 2009. Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah. Medan: Utsu Press
- Sedarmayanti. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Ke Lima. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Siswanto, P. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, S. (2009/2012). Sosiologi Keluarga. Jakarta: Rajawali Pers
- Soetomo. 2009. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan RD. Bandung: Alfabeta
- Surasih, M. 2012. Pemerintahan Desa dan Implementasinya. Jakarta: Erlangga
- Syafiie, I.K. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
- Syani, A. 2013. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, M. 2010. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Yogyakarta: Gava Media
- Tjokroamidjojo, B. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES